



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIAH KUSUMA HANURANINGTYAS
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 979871

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 1.800 m2 di KAB / KOTA DEMAK, Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 66.750.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO CW Tahun 2009, WARISAN Rp. 2.750.000
3. MOBIL, SUZUKI ESCUDO Tahun 2005, WARISAN Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.772.250.000

III. HUTANG Rp. 214.923.115

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.557.326.885

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.